

**KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEKERJA PEREMPUAN DI PABRIK  
PENGOLAHAN IKAN SETELAH PEMBERLAKUAN REGULASI MENTERI  
KELAUTAN TENTANG ILEGAL FISHING TAHUN 2014  
(Study kasus di kota Bitung)**

Oleh

Maria Heny Pratiknjo<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Over time, the level of modernization and information that is increasingly global, the success of the women's emancipation movement and awareness about gender roles then predicted ahead the public sector will be much loved and absorb labor women. In the exercise we can see that the dual role of women resulted in a shift in values within the family structure changes in functional form in the allocation of time and activities for families, household affairs, social work economy, self development and utilization of free time. Awareness of the economic aspect of the right to life as well as the responsibility for fulfilling personal needs and family have pushed humans to strive to enter into the world of work. Keterpanggilan to work outside the home in the public sector with the aim of earning. The town of Bitung is a hub of business development of fisheries in North Sulawesi province in terms of the infra structure is very supportive of the area became a producer of fishery products for the domestic market and abroad (Department of agriculture and fisheries 2014 year in North Sulawesi). As for the number of factories in the town of Bitung fish manager until the year 2014 totaled 53 factory, which consists of a number of qualifying effort with workers until 2014 thn amounted to 12,848 March 2017 and hoses down drastically and left over 2000 workers. (Department of Fisheries and marine Prov. Flammable). Needs to be taken anticipatory measures for the empowerment of women workers get around given many a domino effect that will occur, among others, an increase in crime. This study uses qualitative methods, in-depth interviews and observations through using triangulation techniques in data collection.*

*Keywords: women, industrial workers, regulation*

---

<sup>1</sup> Dosen Antropologi Fispol Unsrat

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan informasi yang semakin mengglobal serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan kesadaran tentang peran gender maka diprediksi ke depan sektor publik akan banyak digandrungi oleh perempuan. Dalam pelaksanaan dapat kita lihat bahwasanya peran ganda perempuan berdampak pada pergeseran nilai dalam keluarga berupa perubahan struktur secara fungsional dalam lingkup alokasi waktu dan kegiatan untuk keluarga, urusan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan sosial ekonomi, pengembangan diri dan pemanfaatan waktu luang. Kesa-daran terhadap hak hidup dari aspek ekonomi serta berbagai tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga telah mendorong manusia untuk berupaya masuk dalam dunia kerja. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Bitung.

Secara administratif Kota Bitung terletak antara 1°23'23" - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT. Berdasarkan posisi geografis, Kota Bitung memiliki batas -batas sebagai berikut:

Sebelah Utara – Berbatasan dengan Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara) dan Laut Maluku;

Sebelah Selatan – Berbatasan dengan Laut Maluku;

Sebelah Barat –Berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara);

Sebelah Timur – Berbatasan dengan Laut Maluku.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bitung terletak di daratan pulau Sulawesi dan sebagian adalah daerah kepulauan yaitu Pulau Lembeh. Kota Bitung terdiri dari 8 Kecamatan, 6 Kecamatan terletak di pulau Sulawesi yaitu Kecamatan Madidir, Matuari, Girian, Aertembaga, Maesa dan Ranowulu dan 2 Kecamatan terletak di Pulau Lembeh yaitu Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. Kepadatan penduduk di Kota Bitung tahun 2017 mencapai 677 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Girian dengan kepadatan sebesar 6,044 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Ranowulu, masing-masing sebesar 130

jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Matuari menjadi kawasan dengan perumahan permukiman terluas dengan luas sebesar 458.35 Ha diikuti dengan kecamatan Madidir dengan luas 330.74 Ha.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Bitung Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung pada Tahun 2017 sebesar 450 orang dan mengalami peningkatan sebesar 6.38 % dibanding tahun sebelumnya. Pencari kerja yang terdaftar didominasi dengan berlatar belakang pendidikan terakhir SMA yaitu sejumlah 211 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 13.44% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk para pencari kerja masih tetap didominasi preferensi laki -laki yaitu sebesar 272 orang dengan peningkatan sebesar 7.08%.

BLKI Kota Bitung pada tahun 2017 menghasilkan 400 angkatan kerja terlatih yang terbagi di 9 jenis ketrampilan. Ketrampilan listrik merupakan ketrampilan tersedia terbanyak diikuti oleh angkatan kerja yaitu sebesar 112 orang. Penduduk yang termasuk angkatan kerja pada tahun 2017 berjumlah 87.731 jiwa atau 61.17 persen dari penduduk usia kerja.

Sebesar 90.15% penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sebesar 9.85% penduduk merupakan pengangguran terbuka. Angka pengangguran ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Para perempuan dengan struktur sosial dan pendidikan tertentu, terpanggil untuk bekerja di luar rumah dalam sektor publik dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Keterpanggilan untuk masuk dalam dunia kerja tidak sekedar menjalani peran kodrati dalam sektor domestik yakni mengurus rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah lainnya antara lain mencuci, memasak mengurus anak dan suami yang tidak mendapat penghasilan. Adapun keterlibatan perempuan untuk melakoni peran ganda tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

- Faktor Budaya Masyarakat
- Motivasi,
- Keinginan yang besar untuk aktualisasi,
- Keyakinan positif terhadap diri sendiri bahwasanya mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dapat

meningkatkan ekonomi keluarga

Keputusan untuk melaksanakan peran ganda baik dalam sektor domestik maupun sektor publik merupakan tantangan yang harus dilakoni mengingat kebutuhan keluarga yang semakin meningkat.

Selama beberapa dekade terakhir diperkirakan jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di sektor industri mengalami kenaikan kurang lebih 10 %. Salah satunya adalah perempuan yang bekerja menjadi buruh pabrik pengolahan ikan di Kota Bitung. Kota Bitung merupakan sentra pengembangan usaha perikanan di Provinsi Sulawesi Utara dari segi infrastruktur sangat mendukung kawasan tersebut menjadi penghasil produk perikanan untuk pasar domestik maupun manca negara (Dinas Pertanian dan Perikanan Sulawesi Utara tahun 2014). Adapun jumlah pabrik pengelola ikan di Kota Bitung sampai tahun 2014 berjumlah 53 pabrik, yang terdiri atas usaha dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 7 unit usaha pengalengan ikan,
- 5 unit usaha
- 12 unit usaha pengolahan tuna segar\

- 29 unit pembekuan (cold storage)

dengan jumlah pekerja perempuan sampai tahun 2014 berjumlah 12.848.

### **PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TEN-TANG ILEGAL FISHING**

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia maka secara perlahan tapi pasti berdampak pada menurunnya ekspor perikanan dan ekspor ikan di Indonesia termasuk di Kota Bitung. Selang bulan Maret tahun 2017 para pekerja di industri perikanan turun drastis dan tersisa 2000 pekerja dari 12.848 pekerja, dengan sistem kerja shift. Artinya dalam jangka waktu satu bulan mereka hanya mendapat alokasi waktu bekerja selama 2 sampai 4 hari. (Dinas Perikanan dan Kelautan prov. Sulut 2018 dan hasil penelitian lapangan).

Kontroversial kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan menjadi bahan perbincangan di kalangan pekerja bahkan para pengusaha pengolahan ikan. Menurut data penelitian saat ini pengusaha pabrik pengalengan ikan harus

mendatangkan bahan baku (ikan tongkol dan Tuna) dari Muara Karang Jakarta, mengimpor dari negara China dan Philipina. Seorang pengusaha ikan tangkap mengatakan; sangat miris perairan selat Lembah dan sekitarnya di Kota Bitung merupakan lintasan ikan tongkol dan Tuna. Para nelayan hanya bisa membiarkan kawanan ikan itu lewat karena tidak cukup peralatan dan kapal penangkap. Akhirnya ikan tersebut ditangkap di perairan Filipina dan China. Ia menambahkan torang samua kaseh biar rejeki yang so ada di muka mata (rejeke yang sudah di depan mata dibiarkan).

#### **GAMBARAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN PEKERJA DI PABRIK PENGOLAHAN IKAN.**

Di Kota Bitung fenomena sosial imbas dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, terhadap Kehidupan sosial masyarakat sangat luas. Para pekerja perempuan yang awalnya mampu mengaktualisasikan diri mereka pada kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menanggulangi kehidupan rumah tangga menjadi tidak bisa berbuat apa-apa karena terpaksa di PHK. Perusahaan

tempat mereka bekerja harus berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan bahan baku. Kalaupun tidak di PHK mereka hanya bisa bekerja rata-rata 1 bulan satu kali dengan jumlah 3 sampai 4 hari kerja. Itupun jika pabrik akan beroperasi karena memperoleh bahan baku dari luar (Muara Baru Jakarta, China, Pgilipina dll.) .

Hasil penelitian menunjukkan Saat ini di Kota Bitung terjadi kelesuan daya beli masyarakat bahkan sudah ada fenomena meningkatnya berbagai tindakan kriminal akibat PHK besar-besaran. Para pekerja perempuan di pabrik ikan yang kena PHK tidak tau harus menempuh upaya apa sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka ( *....torang pe dapur musti ba asap deng anak-anak boleh pi sekolah* ). Adapun Yang menjadi kekhawatiran bersama adalah jika mereka terpaksa harus memotong kompas dengan melakukan perilaku menyimpang untuk menyasati pemenuhan ekonomi keluarga, ataupun tindakan kriminal lainnya yang

harus dilakukan sekedar bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

### **STRATEGI ADAPTASI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI**

Dalam rangka menyasati kehidupan sosial ekonomi pribadi keluarga diperoleh data di lapangan penelitian bahwasanya pekerja pabrik yang di PHK atau dirumahkan sementara beralih status menjadi penjual kue basah, menjual makanan masak (nasi kuning dan lauk) dan menjadi buruh cuci. Penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi atau tidak seimbang seperti pada waktu mereka aktif bekerja di pabrik. Akibatnya berimbas pada faktor gizi yakni kualitas asupan makanan, pendidikan anak (banyak yang putus sekolah) karena biaya maupun untuk membantu ekonomi keluarga seperti *ba soma*, dan menjadi kuli panggul di pasar, tidak bisa jajan bakso walaupun sudah sangat kepingin (harga satu mangkok bakso sama dengan membeli 1 kg beras dengan kualitas rendah bisa dimakan bersama). Tidak membeli pakaian baru ketika lebaran atau tahun baru.

Beberapa informan dengan berurai air mata mengatakan bahwa kebijakan menteri perikanan dan kelautan telah membuat mereka menjadi lebih susah. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah yang sifatnya tepat sasaran dan tepat guna yang bisa mereka peroleh. Beberapa informan walaupun keadaan sosial ekonomi di bawah garis kemiskinan tapi mereka tidak memperoleh bantuan RASKIN.

Ada juga yang terpaksa harus makan satu kali sehari, kalau tidak ada uang terpaksa mereka makan bubur.

### **UPAYA PEMERINTAH**

Wali kota Bitung, Maxmiliaan Jonas Lomban mengatakan,

*"Saat ini pasokan ikan kepada 56 pabrik unit produksi ikan Bitung telah diberhentikan, sehingga mengancam terjadinya PHK, otomatis angka pengangguran akan meningkat,"* sumber Antara Manado, Rabu (19/10).

Melihat kondisi ini, dia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut aturan moratorium nomor 56 dan 57.

Permen KP Nomor 56 tahun 2014 yang membahas moratorium perizinan usaha perikanan izin tangkap kapal eks asing telah menyelamatkan uang negara. Sedangkan Permen Nomor 57 2014 berisi tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia. "berbagai upaya dilaksanakan Pemerintah Kota Bitung bersama para penggiat perikanan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut moratorium nomor 56 dan 57 tahun 2014," walikota Bitung bapak Maxmilianus Lomban berharap, pemerintah pusat bisa meninjau kembali aturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pujiastuti.

*"Seyogianya pemerintah pusat memberikan kebijaksanaan khusus dalam memenuhi kebutuhan bahan baku unit produksi ikan,"* ungkap Lomban.

Saat ini Pemerintah Kota Bitung juga terus berjuang mengambil langkah-langkah sebagai upaya memajukan kembali sektor perikanan di Kota Bitung khususnya dan Indonesia secara keseluruhan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal penangkap Ikan Bitung, Ruddy Walukow membenarkan

kekurangan stok ikan untuk unit produksi ikan di Bitung, karena perusahaan pemasok di Jakarta sudah ditutup juga.

*"Mudah-mudahan pemerintah pusat melihat penderitaan masyarakat, karena tidak semua warga yang bekerja di sektor perikanan adalah nelayan, tetapi banyak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan atau pabrik ikan terancam kena PHK,"* demikian Walukow.

Sejak awal tahun 2018 Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman sudah mengingatkan untuk meninjau kembali kebijakan penenggelaman kapal asing karena tidak diatur dalam Undang-Undang no 45 tahun 2009. Lebih lanjut ditandaskan kapal asing yang melakukan *illegal fishing* harusnya ditahan bukan ditenggelamkan. Selanjutnya kapal-kapal tersebut bisa dimodifikasi dan dipergunakan untuk kesejahteraan banyak masyarakat nelayan. Tapi lewat beberapa berita di berbagai media sosial Menteri Susi mengatakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* jalan terus. Hal tersebut tentunya akan makin memperburuk dan mempersulit masyarakat

nelayan, perusahaan pengolahan ikan, bahkan para pekerja di industri pengolahan ikan.

## **KESIMPULAN**

Kota Bitung merupakan sentra pengembangan usaha perikanan di provinsi Sulawesi Utara dari segi infra struktur sangat mendukung kawasan tersebut menjadi penghasil produk perikanan untuk pasar domestik maupun manca negara (Dinas Pertanian dan Perikanan Sulawesi Utara tahun 2014). Adapun jumlah pabrik pengelola ikan di kota Bitung sampai tahun 2014 berjumlah 53 pabrik, dengan jumlah pekerja sampai tahun 2014 berjumlah 12.848 setelah pemberlakuan kebijakan menteri kelautan dan perikanan tahun 2014, sampai tahun 2016 sampai saat ini terjadi pemutusan hubungan kerja dengan merumahkan 10.848 pekerja perempuan dipabrik pengalengan ikan.

Kehidupan Sosial Para pekerja perempuan yang awalnya mampu mengaktualisasikan diri mereka pada kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menanggulangi kehidupan rumah tangga menjadi tidak bisa berbuat apa-apa karena terpaksa di PHK. Perusahaan tempat mereka bekerja harus berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan bahan baku. Dalam rangka mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga maka mereka beralih profesi antara lain, menjual makanan, kue-kue, menjadi tukang cuci dll.

Penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi atau tidak seimbang seperti pada waktu mereka aktif bekerja. Akibatnya berimbas pada factor gisi yakni kualitas asupan makanan, pendidikan anak (banyak yang putus sekolah) karena biaya maupun untuk membantu ekonomi keluarga seperti ba soma, dan menjadi kulih panggul dipasar.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.L. dan C. Kluckhohn. 1952. *Culture, A critical review of Concepts and Defenitions*. Cambridge, Peabody Museum of American. Archeology
- Efriza, 2012, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta
- Hoebel, E. Adamson.1958. *Man in the Primitive World : An Introduction to Anthropology, 2nd edition*, McGraw-Hill Book Company Inc., New York.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Djambata
- Lips, Hillary M. 2007. *Sex & Gender : An Introduction*. New York :McGraw-Hill Higher. Education,.
- Luzbetak, Louis J., 1988. *The Church and Cultures. New Perspectives in Missiological Anthropology*. New York.
- Peodjawijatna, I.R. & P.J. Zoetmulder. 1956. *Tata Bahasa Indonesia*. Djakarta: Obor.
- Sir Edward B. Tylor. 1871. *Primitive Culture [microform] : Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*. Cambridge london
- Wilson, H.T. 1989. *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*. Netherlands: Brill
- Permen KP Nomor 57 2014 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.